

ESKALASI KETEGANGAN RUSIA-UKRAINA

7

Sita Hidriyah

Abstrak

Ketegangan Rusia-Ukraina yang meningkat dewasa ini telah menyita perhatian dunia. Ketegangan tersebut ditandai oleh pengerahan ratusan ribu tentara Rusia di perbatasan Ukraina dan respons sejumlah negara anggota Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO), termasuk Amerika Serikat (AS), terhadap langkah Rusia tersebut. Kehadiran NATO, yang seolah menjadi ancaman bagi Rusia, ikut mengambil peran dalam menimbulkan eskalasi ketegangan di perbatasan Rusia-Ukraina. Tulisan ini menganalisis bagaimana sesungguhnya hubungan Rusia-Ukraina serta latar belakang meningkatnya ketegangan di antara mereka, dan reaksi internasional menanggapi situasi ini. Menjadi kewajiban masyarakat internasional untuk terus mengupayakan penyelesaiannya secara damai, sehingga kekhawatiran akan munculnya perang dunia baru tidak terjadi. Konflik yang terus berlangsung, pada akhirnya akan merugikan banyak pihak, tidak saja negara-negara Eropa, tetapi juga negara-negara di kawasan lainnya. Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional dan dengan politik luar negerinya yang bebas aktif, perlu ikut mengambil peran untuk mengupayakan solusi terbaik bagi penyelesaian konflik Rusia-Ukraina.

Pendahuluan

Konflik Rusia-Ukraina kembali memanas pada awal Februari 2022 setelah armada tempur Rusia unjuk kekuatan di perbatasan Ukraina, tepatnya di Belarus. Kekuatan Rusia yang dikirim dalam jumlah cukup besar itu diperkirakan dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk melakukan invasi ke Ukraina, dan menjadi penyebab terjadinya eskalasi ketegangan dalam hubungan Rusia-Ukraina, meskipun upaya

diplomasi telah dilakukan dan belum memberikan solusi.

Dalam perspektif negara-negara anggota NATO, eskalasi ketegangan yang terjadi dalam hubungan Rusia-Ukraina tidak dapat dilepaskan dari tindakan-tindakan Rusia yang tidak hanya memicu krisis di Ukraina sendiri, tetapi juga dalam hubungan Rusia dengan negara-negara Uni Eropa dan AS yang tergabung dalam NATO, yaitu aliansi negara-negara Eropa, AS, dan Kanada di bidang



pertahanan. Tulisan ini membahas bagaimana sesungguhnya hubungan antara Rusia dan Ukraina serta latar belakang meningkatnya ketegangan di antara mereka, dan bagaimana reaksi internasional menanggapi situasi yang sedang terjadi.

Hubungan Rusia-Ukraina

Rusia dan Ukraina memiliki hubungan secara geopolitik yang bersinggungan. Secara geopolitik Ukraina berada di dua sisi, di mana pro-Eropa berada di bagian barat, sedangkan pro-Rusia berada di bagian timur. Kedua negara pernah menjadi bagian dari Uni Soviet, namun pasca-Uni Soviet runtuh, Ukraina mendeklarasikan kemerdekaan negaranya pada 24 Agustus 1991. Setelah Rusia dan Ukraina berdiri sendiri menjadi negara merdeka, kedua negara membangun hubungan diplomatik pada 14 Februari 1992 yang disusul dengan kesepakatan beragam perjanjian dan kerja sama pada tahun 1997.

Seiring berjalannya waktu, hubungan bilateral kedua negara mengalami pasang surut, di antaranya pergantian kepemimpinan yang membawa Ukraina ke arah Barat yang mengakibatkan mulai berkurangnya peran Rusia. Selain itu, Ukraina juga memiliki keinginan untuk menjadi anggota Uni Eropa, dan dalam perkembangannya kemudian muncul keinginan dari pemimpin Ukraina pro-Eropa untuk menjadi anggota NATO.

Di bidang ekonomi, sengketa yang terkait pasokan gas juga dialami dalam hubungan Rusia dan

Ukraina pada tahun 2006. Rusia merupakan produsen minyak serta gas alam bagi banyak negara Eropa, termasuk Ukraina. Ukraina sendiri sangat mengandalkan pasokan gas dari Rusia dan menjadi jalur transit bagi pasokan gas dari Rusia menuju Eropa. Dalam kerja sama gas, pada 1 Januari 2006 terjadi penghentian pasokan gas dari Rusia akibat kenaikan harga. Hal ini terus berlanjut hingga perusahaan gas tersebut mengurangi jumlah pengiriman, dikarenakan ketidakmampuan Ukraina dalam membayar utang dan denda kepada Rusia. Akibat lainnya, ekspor gas ke Eropa menjadi terhambat.

Ketegangan Hubungan Rusia-Ukraina

Ketegangan hubungan Rusia dan Ukraina sesungguhnya sudah terjadi sejak tahun 2014. Saat itu, rakyat Ukraina yang memilih untuk lebih independen menggulingkan presiden Viktor Yanukovich yang pro-Rusia. Demonstrasi pro-Uni Eropa terjadi akibat penolakan terhadap kebijakan Viktor yang lebih memilih berhubungan dagang dengan Rusia. Pelengseran Viktor menyebabkan konflik pada pemerintahan Ukraina hingga terbagi menjadi dua golongan, pro Uni-Eropa dan pro-Rusia. Pro-Rusia berasal dari masyarakat serta politisi Crimea. Sayangnya, kepentingan Rusia dalam menyelesaikan konflik internal Ukraina menjadi upaya pemanfaatan Rusia untuk mendapatkan wilayah Crimea. Letak Crimea yang strategis rupanya dimanfaatkan oleh Rusia untuk memperkuat pengaruhnya di Kawasan Eropa Timur dan Tengah.

Pada akhirnya, parlemen Crimea melakukan referendum saat krisis Crimea berakhir pada 16 Maret 2014 dengan bergabung ke Rusia dan melepaskan diri dari Ukraina.

Setelah krisis Crimea, pasang surut hubungan Rusia-Ukraina masih terjadi hingga bulan Februari 2022. Krisis berawal dari NATO yang tengah berupaya mengekspansi keanggotaannya ke Eropa Timur dengan menarik Ukraina sebagai target. Hal ini dinilai oleh Rusia menjadi ancaman serta pelanggaran, dan sebagai akibatnya, Presiden Putin tidak membiarkan Ukraina lepas begitu saja. Hal tersebut adalah sesuatu yang wajar bagi seorang presiden Rusia yang tidak merelakan 'saudara seperjuangannya' melepaskan diri. Oleh karena itu, juru bicara Rusia membantah tuduhan dari Barat bahwa negaranya berencana menginvasi Ukraina dan beranggapan tuduhan tersebut hanya upaya provokasi demi meningkatkan ketegangan.

Namun sayangnya, tindakan Rusia ini sudah membawa dampak bagi negara pendiri NATO. Dampaknya yaitu tindakan AS dan Kanada yang merelokasi staf kedutaannya ke Kota Lviv yang berjarak 70 kilometer dari perbatasan Ukraina-Polandia. Kedua negara tersebut beserta Inggris secara jelas telah menampakkan ketegasan dukungannya terhadap kedaulatan Ukraina. Dampak dukungan inilah yang sepertinya menjadikan Rusia semakin tidak mempercayai Ukraina.

Di luar dari krisis kepercayaan antara Rusia dan Ukraina, upaya penyelesaian konflik tetap perlu

dilakukan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyerukan bahwa diplomasi serta dialog adalah cara terbaik dalam menyelesaikan konflik. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah terjadinya babak baru "Perang Dingin" yang dapat berlangsung antara Rusia dan AS. Jika perang terjadi tentunya mengancam keselamatan banyak orang dan dampaknya sangat luas, tidak saja di Eropa Timur. Implikasi seperti inilah yang dapat ditimbulkan dari konflik Rusia-Ukraina dari sekian banyak akibat atau dampak lainnya.

Dampak lain, di antaranya permintaan pemerintah asing bagi warga negara untuk segera meninggalkan Ukraina. Kemudian adanya sanksi keras yang telah dipersiapkan oleh negara Eropa lainnya, dan konsekuensi ekonomi yang bisa dialami kelompok ekonomi Barat besar G-7 (tujuh negara maju dengan ekonomi terbesar). Kelompok ini bahkan sudah menyatakan kesiapannya untuk bertindak cepat dalam mendukung ekonomi Ukraina. Sanksi-sanksi yang diberikan kepada Rusia ini semakin menunjukkan jika Ukraina mendapat dukungan dari banyak pihak. Oleh karenanya, Rusia setidaknya perlu berpikir kembali jika memang akan melakukan invasi militer ke Ukraina.

Reaksi NATO dan Internasional

NATO secara tidak langsung memiliki kepentingan dengan negara Ukraina. NATO yang merupakan organisasi aliansi pertahanan Uni Eropa membuka pintu bagi Ukraina untuk diizinkan

bergabung. Namun, hal itu membuat posisi Ukraina berada di ujung peperangan dengan Rusia jika memilih bergabung ke NATO. Dukungan terhadap Ukraina dapat dikatakan cukup besar setelah para pemimpin Eropa memiliki suara yang sama atas Ukraina walaupun ada perbedaan dalam dukungan yang ditawarkan. Terlebih lagi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan jika negaranya akan terus berusaha menjadi anggota NATO meskipun Rusia tersulut kemarahan.

Ukraina terlihat percaya jika dirinya memang harus mampu bergerak di jalan yang sudah dipilih. Kepercayaan diri ini makin bertambah terutama setelah negara AS, Inggris, dan beberapa anggota NATO mengirimkan bantuan ke Ukraina berupa amunisi, rudal, jet tempur, kapal perang serta alat medis. Di sisi lain, Presiden Putin, yang merasa terancam dengan tindakan negara-negara Barat yang menggunakan NATO untuk mengepung Rusia, menginginkan aliansi tersebut menghentikan kegiatan militernya di Eropa Timur. Rusia beranggapan, kegiatan NATO mendekati negara-negara pecahan Uni Soviet merupakan ancaman. Bahkan, Putin sendiri sudah menganggap AS melanggar perjanjian yang dibuat sejak lama di mana NATO tidak akan memperluas jangkauannya ke Eropa Timur. Sebaliknya, hal tersebut dibantah NATO dengan menyatakan bahwa sejumlah negara kecil yang berbatasan dengan Rusia kini sudah bergabung ke dalam NATO sebagai aliansi pertahanan, di antaranya Estonia, Latvia, dan Lithuania. Pernyataan

NATO inilah yang dinilai mendapatkan reaksi internasional.

Reaksi internasional atas ketegangan yang terjadi, termasuk dari negara-negara kecil tadi, pada dasarnya tidak menginginkan adanya peperangan. Itulah sebabnya banyak opini bermunculan, jika perang terjadi akan menimbulkan masalah bagi masyarakat internasional, seperti terhambatnya pasokan gas terutama bagi Uni Eropa dan masalah lainnya yang berkaitan dengan situasi keamanan di Eropa. Jika invasi oleh Rusia terjadi, hal tersebut akan menimbulkan instabilitas bagi Eropa.

Oleh karenanya, sebelum hal itu terjadi, saat inilah waktu yang tepat untuk menurunkan ketegangan, mengurangi pergerakan, dan menahan ancaman, termasuk menghentikan retorika yang bisa menyulut ketegangan. Yang harus dilakukan sekarang adalah mencegah terjadinya peperangan, mengingat dampaknya juga akan memengaruhi berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, energi terutama dengan negara-negara tetangga dari Ukraina dan Rusia antara lain Belarusia, Hungaria, dan Rumania.

Penutup

Konflik Rusia-Ukraina bisa saja dilihat sebagai persoalan internal bagi kedua negara. Namun, keberadaan Ukraina sebagai entitas yang cukup penting di perbatasan dengan Rusia, tidak saja memiliki nilai strategis bagi Rusia, tetapi juga bagi negara-negara Eropa Barat, sehingga krisis Ukraina pun mengundang kepentingan banyak pihak, termasuk AS yang

tergabung dalam NATO bersama negara-negara Uni Eropa. Krisis Rusia-Ukraina yang belum menemukan penyelesaiannya hingga kini, setidaknya hingga Februari 2022, menimbulkan keprihatinan internasional mengingat perang atau konflik terbuka sangat berpotensi terjadi jika para pihak yang berseteru tidak bisa mengendalikan diri lagi. Akhir episode dari krisis Rusia-Ukraina ini belum bisa diprediksi secara jelas, karena hasilnya tetap bergantung dari upaya para pemimpin, kesepakatan kedua kubu, serta ego pertahanan masing-masing yang dapat saja meledak hingga berakibat perang.

Oleh karena itu, menjadi kewajiban masyarakat internasional untuk terus mengupayakan penyelesaiannya secara damai, melalui dialog dan pendekatan diplomasi, sehingga kekhawatiran akan munculnya perang dunia baru tidak terjadi. Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional dan dengan politik luar negerinya yang bebas aktif, perlu ikut mengambil peran untuk mengupayakan solusi terbaik bagi penyelesaian konflik Rusia-Ukraina. Karena konflik yang terus berlangsung, pada akhirnya akan merugikan banyak pihak, tidak saja negara-negara Eropa, tetapi juga negara-negara di kawasan lainnya. Hubungan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, dengan Rusia dan Ukraina akan terganggu karena perang yang berkecamuk di kawasan Eropa Timur tersebut. Hubungan yang terganggu tersebut bisa mencakup kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan yang berkaitan dengan kepentingan

ekonomi rakyat di masing-masing negara.

Oleh karena itu pula, parlemen sebagai representasi rakyat perlu juga menyuarakan pentingnya penyelesaian damai dalam mengatasi krisis yang terjadi dalam hubungan Rusia dan Ukraina. Berbagai pertemuan forum antar-parlemen, terutama forum antar-parlemen tingkat global, sudah seharusnya menyuarakan dan mendorong pentingnya krisis yang terjadi di Ukraina diselesaikan secara damai. Pertemuan forum Antar-Parlemen Sedunia (*Inter-Parliamentary Union*) ke-144 yang akan diselenggarakan di Bali pada Maret 2022, sudah seharusnya juga menyuarakan pentingnya krisis di Ukraina untuk diatasi, jika krisis tersebut belum berhasil dicapai solusi damainya.

Referensi

- “Apa yang Dicari Vladimir Putin Di Ukraina?”, Kompas, 13 Februari 2022, hal. 20.
- “Apa Itu NATO dan Masalahnya dengan Rusia-Ukraina?”, <https://www.kompas.com/global/read/2022/01/29/090300570/apa-itu-nato-dan-masalahnya-dengan-rusia-ukraina?page=all>, diakses 15 Februari 2022.
- “Krisis Bereskalasi, Warga Asing Diminta Keluar Ukraina”, Kompas, 13 Februari 2022, hal. 3
- “NATO-Rusia Sama-Sama Tambah Pasukan”, Kompas, 12 Februari 2022, hal. 4.

"Perang Bisa Meletus Kapan Saja, Ini Asal Mula Pertikaian Rusia dan Ukraina", <https://internasional.kontan.co.id/news/perang-bisa-meletus-kapan-saja-ini-asal-mula-pertikaian-rusia-dan-ukraina?page=all>, diakses 14 Februari 2022.

"Rusia Mulai Tarik Sebagian Pasukan", Media Indonesia, 16 Februari 2022, hal. 14.

"Sejarah Hubungan Rusia dan Ukraina", <https://www.kompas.com/stori/read/2022/01/31/100000979/sejarah-hubungan-rusia-dan-ukraina?page=all>, diakses 14 Februari 2022.



Sita Hidriyah
sita.hidriyah@dpr.go.id

Sita Hidriyah, S.Pd.,M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Keguruan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Atmajaya Jakarta pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Hubungan Internasional dari FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Upaya Pemerintah dan Kerjasama Luar Negeri Dalam Pengentasan Kemiskinan Menuju Pembangunan Berkelanjutan" (2013), "Pengungsi Suriah dan Respons Internasional dan Asian Parliamentary Assembly (APA)" (2016), dan "Tantangan Kerjasama Indonesia dan Jepang Dalam Diplomasi Ekonomi " (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.